

MENGUNGKAP SEJARAH MOHAMMAD HASAN SEBAGAI BUPATI MILITER KABUPATEN MUSI ULU RAWAS PADA MASA AGRESI BELANDA II

Berlian Susetyo¹⁾ Muhammad Wahayuni²⁾ Eva Kusmalwati³⁾

^{1) 2) 3)}Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya, Lubuklinggau, Indonesia

¹⁾berlian.subkoss@gmail.com ²⁾muhammadwahayuni5@gmail.com

³⁾eva.kusmalwati@yahoo.com

Abstrak

Selama berlangsungnya Agresi Militer II Belanda, pemerintah RI memberlakukan pemerintahan militer, yakni pemerintahan yang secara taktis membawahi pemerintahan sipil dan merupakan alat negara di bawah pemerintahan militer, termasuk Kabupaten Musi Ulu Rawas dengan Bupati Militer Mohammad Hasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sejarah Mohammad Hasan sebagai Bupati Militer di Kabupaten Musi Ulu Rawas pada periode Agustus hingga Desember Tahun 1949. Metode penelitian yang digunakan ialah metode sejarah, dengan tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan Mohammad Hasan dengan watak keras, cakap, dan disiplin tinggi menghantarkannya menjadi bupati Musi Ulu Rawas, apalagi setelah kekosongan pemerintahan setelah bupati sebelumnya, A. Aziz memilih bergabung dengan militer Sub Teritorium Palembang (STP) yang dipimpin Letkol Bambang Utoyo dan sipil Karesidenan Palembang dipimpin Residen Abdul Rozak yang mundur ke arah Pagaralam. Maka sosok Mohammad Hasan yang tegas dan bijaksana diperlukan dalam membuat keputusan darurat ketika masa perang gerilya akibat agresi militer Belanda II ini.

Kata kunci: *mohammad hasan, bupati militer, musu ulu rawas*

Abstract

During the Second Dutch Military Aggression, the Indonesian government imposed a military government, namely a government that tactically supervised the civilian government and was an instrument of the state under military rule, including the Musi Ulu Rawas Regency with the Military Regent Mohammad Hasan. This study aims to reveal the history of Mohammad Hasan as Military District Head in Musi Ulu Rawas Regency from August to December 1949. The research method used is the historical method, with stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that Mohammad Hasan with a strong, capable, and high-disciplined character led him to become the regent of Musi Ulu Rawas, especially after the vacancy of government after the previous regent, A. Aziz chose to join the Palembang Sub-Territory military (STP) led by Lt. Col. Bambang Utoyo and civilians of the Residency Palembang was led by Resident Abdul Rozak who withdrew to Pagaralam. So the figure of Mohammad Hasan who was firm and wise was needed in making emergency decisions during the guerrilla war period due to the Dutch military aggression II.

Keywords: *mohammad hasan, military district head, musu ulu rawas*

Pendahuluan

Selama berlangsungnya Agresi Militer II Belanda, pemerintah RI memberlakukan pemerintahan militer, yakni pemerintahan yang secara taktis membawahi pemerintahan sipil, dan merupakan alat negara di bawah pemerintahan militer. Terlaksananya *de facto* dan *de jure* pemerintah merupakan

tanggung jawab utama pemerintahan militer. Sesuai dengan tanggung jawab itu, maka pemerintahan militer bertugas mengerahkan semua kekuatan masyarakat untuk pertahanan negara, mengerahkan tenaga sipil, serta melaksanakan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan militer pada

hakikatnya ialah kerjasama angkatan perang dan rakyat (Pusat Sejarah dan Tradisi TNI 2000:275). Pemerintahan militer ini mengaju pada pendirian Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Belanda menganggap bahwa Indonesia sudah hancur lebur berhubung Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta berada dalam tahanan mereka (Hasan 1990:125). Kehadiran PDRI membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah menyerah. Pemimpinnya bisa tertangkap, Presiden bisa tertawan, tetapi pemerintahan Republik Indonesia masih tegak berdiri.

Pelaksanaan pemerintahan militer di Sumatera tidak begitu banyak diketahui. Dalam pelaksanaan pemerintahan militer, seorang Gubernur Militer bertanggung jawab di bidang pemerintahan sipil kepada Komisariat Pemerintah Pusat (Kompempus), dan di bidang militer kepada Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS). Secara teoritis, setiap tindakan yang diambil mengenai masalah pertahanan dan keamanan, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PTTS. Namun kesulitan dan kurangnya pengendalian PTTS, menyebabkan gubernur militer mengambil kebijaksanaan sendiri-sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Akan tetapi, pokok-pokok kebijaksanaan itu tidak menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh PTTS dan Kompempus. Saat itu, jabatan PTTS dipimpin oleh Kolonel Hidayat, sedangkan Komisariat Pemerintah Pusat (Kompempus) untuk Daerah Sumatera Selatan dijabat oleh drg. Moh. Isa (Hasan 1990:126; Pusat Sejarah dan Tradisi TNI 2000:275).

Di Sumatera Selatan, yang diangkat menjadi gubernur militer ialah seorang sipil. Ia dibantu oleh komandan militer daerahnya sebagai wakil gubernur militer. Pada tanggal 23 Desember 1948 dalam rapat yang diadakan antara gubernur, pimpinan tentara dan badan pekerja daerah Sumatera Selatan, maka dr. AK. Gani diangkat sebagai gubernur militer, wakilnya ialah Kolonel Maludin Simbolon yang disahkan oleh Kompempus. Wilayah kekuasaan gubernur militer ini meliputi Sumatera Selatan dan daerah Jambi. Susunan personalia pemerintahan militer ini dari gubernur militer hingga eselon di bawahnya (Subkoss 2003:402).

Daerah Kabupaten Musi Ulu Rawas tidak lepas dari pemerintahan militer dibawah pimpinan gubernur militer yakni dr. AK. Gani yang memutuskan untuk wilayah Sumatera Selatan melakukan perang gerilya dalam mempertahankan kedaulatan dari serangan Belanda. Sehingga wilayah Musi Ulu Rawas juga menjalankan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Mohammad Hasan. Meskipun masa kepemimpinan Bupati Mohammad Hasan terbilang singkat akibat transisi konstitusional di pusat, sementara pemerintahan sipil waktu itu dituntut lebih dinamis dalam mengambil langkah strategis yang melibatkan wedana dan pesirah. Sebab salah satu tugas mereka adalah untuk memobilisasi pemuda dan masyarakat untuk terlibat dalam menghadapi serangan pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai tanah air. Pada masa keadaan darurat perang itu, maka organ pemerintahan disebut bupati militer, wedana militer, dan pesirah

militer (Nizar and Pasaribu 2014:xxx).

Munculnya permasalahan yang membicarakan mengenai perlunya dilakukan pembahasan secara khusus tentang topik adanya bupati militer (*bupati perang*) di periode akhir masa revolusi fisik tahun 1949 di pemerintahan Kabupaten Musi Ulu Rawas, sehingga menjadi perjalanan sejarah yang sangat panjang. Informasi tentang masa pemerintahan di akhir tahun 1949, telah berhasil disusun dalam bentuk buku yang terdiri dua judul, yaitu: *"Dari Periode ke Periode Bupati Musi Rawas 1945-2015"* dan *"Sejarah dan Peranan SUBKOSS dalam Perjuangan Rakyat Musi Rawas Tahun 1945-1950"*. Kedua buku tersebut telah selesai, namun tim penyusun masih dianggap memerlukan waktu untuk menanggapi informasi-informasi itu dan diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan secara khusus dari penulisan kedua buku tersebut.

Di kemudian hari, penulis telah berhasil memperoleh informasi sangat berharga, yaitu informasi yang dapat dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian peristiwa dan dipandang perlu merekonstruksi penulisan sejarah. Informasi yang dimaksud adalah tentang adanya bupati pada masa pemerintahan dari bulan Agustus hingga Desember 1949 untuk Kabupaten Musi Ulu Rawas.

Sosok Mohammad Hasan ini merupakan seorang komisaris polisi yang kemudian diangkat menjadi bupati militer, karena kecakapan dan kesungguhan hatinya dalam mengikuti perang gerilya bersama unsur sipil dan militer daerah Sumatera Selatan. Apalagi beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki watak keras dan disiplin

tinggi, tanpa kompromi pada siapapun yang berbuat salah, sehingga hal ini diperlukan untuk mengisi kekosongan pemerintahan Kabupaten Musi Ulu Rawas, terutama untuk seorang yang tegas dan bijaksana dalam membuat keputusan darurat ketika masa perang gerilya akibat agresi militer Belanda II ini.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka tulisan ini merumuskan masalah antara lain: Bagaimana sejarah dan situasi Kabupaten Musi Ulu Rawas? Bagaimana biografi Mohammad Hasan? Dan bagaimana perjuangan Mohammad Hasan sebagai Bupati Militer Musi Ulu Rawas?. Tujuan dari tulisan ini ialah sebuah relevansi untuk mengungkap bagaimana sejarah Mohammad Hasan sebagai Bupati Militer di Kabupaten Musi Ulu Rawas pada Masa Agresi Militer Belanda II.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah (*History*). Metode penelitian sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk 1975:35). Beberapa tahapannya antara lain penentuan topik penelitian, Heuristik atau mengumpulkan sumber, kritik atau memilah data, interpretasi penafsiran, dan historiografi atau penulisan sejarah (Kuntowijyo 1995:69).

Tahapan pertama, *heuristik* adalah proses mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan berdasarkan pokok-pokok masalah yang sedang diteliti sebagai referensi rujukan penelitian. Sumber-sumber sejarah ini dapat berupa sumber tertulis yang terdiri sumber primer maupun sumber sekunder. Adapun

sumber primer yang penulis gunakan berupa arsip wawancara pelaku sejarah yakni Mohammad Hasan sendiri, sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan ialah buku-buku karangan penulis mengenai sejarah perjuangan Sub Komandemen Sumatera Selatan.

Setelah sumber-sumber sejarah terkumpulkan maka pada tahapan kedua ialah kritik sumber, dengan menganalisis sumber yang ditemukan. Kritik sumber ini menyelidiki apakah dokumen sejarah tersebut sejatinya baik dalam bentuk isinya. Sehingga penulis menggunakan dua tahap kritik sumber antara lain kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji apakah aspek-aspek luar sumber, asli atau tidak, seperti jenis kertas, tinta cetak, huruf, dan stempel cap yang digunakan. Sedangkan kritik internal dilakukan agar mengetahui pada aspek isi sumber, yang ditempuh dengan cara melakukan penilaian instrinsik sang penulis atau penyusun sumber tersebut.

Sumber-sumber sejarah yang telah lolos dari tahapan kritik kemudian diinterpretasi. Pada tahap ketiga ini, interpretasi merupakan langkah untuk menafsirkan informasi didalam sumber sejarah itu yang menghasilkan fakta. Dan fakta-fakta yang dihasilkan dan masih saling terkait satu sama lain sehingga jelas klausalitasnya, kemudian disintesis. Kemudian langkah terakhir ialah historiografi, merupakan menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah naskah penelitian yang menarik berdasarkan kronologis sejarahnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah dan Situasi Kabupaten Musi Ulu Rawas

Keberadaan Kabupaten Musi Ulu Rawas dimulai sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mendirikan pemerintahan *Onder Afdeeling Moesi Oeloe* di bawah kekuasaan *Residentie* Palembang, tepatnya setelah Kesultanan Palembang Darussalam jatuh pada tahun 1825. Sedangkan daerah Rawas memiliki pemerintahan sendiri sejak kolonial Belanda berkuasa di Palembang, yakni bernama *Afdeeling Rawas*, namun statusnya kemudian diturunkan menjadi *Onder Afdeeling Rawas* pada tahun 1911 (*Staatsblad no. 601, 1911:2*). Sehingga kedua *onder afdeeling* ini berada dalam pemerintahan masing-masing yang dipimpin seorang *controleur*. Semula ibukota *Onder Afdeeling Moesi Oeloe* berada di Muara Beliti lalu dipindahkan ke Lubuklinggau tahun 1934 (*Staatsblad no. 186, 1934:1*), dan ibukota *Onder Afdeeling Rawas* berada di Surulangun.

Setelah Jepang berhasil mengambilalih wilayah jajahan Hindia Belanda tahun 1942, maka seluruh tatanan pemerintahan berubah sesuai dengan kepentingan Jepang. Daerah Musi Ulu dan Rawas pada kolonial Belanda sebelumnya berstatus *onder afdeeling*, diturunkan satu tingkat menjadi tingkat *district* yang dalam istilah Jepang bernama *Gun*. Sehingga namanya menjadi *Musikami Gun* dan *Rawas Gun*. Kemudian pada tanggal 20 April 1943, *Musikami Gun* dan *Rawas Gun* disatukan untuk membentuk *Bunshu Musikami Rawas* (*Bunshu* setingkat dengan *Afdeeling*, ialah kabupaten) yang berkedudukan di Lubuklinggau. Sehingga pemerintahan *Bunshu Musikami Rawas* ini membawahi

Musikami Gun dan *Rawas Gun* itu sendiri (Susetyo and Ravico 2021b:26). Penggabungan inilah yang kemudian menjadi hari jadi Kabupaten Musi Rawas sekarang ini.

Setelah Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama pemerintah RI berinisiatif untuk mengambilalih pemerintahan dari tangan Jepang. Ketika berita proklamasi kemerdekaan baru terdengar pada 19 Agustus 1945 di Lubuklinggau, maka rakyat dan para pemuda pejuang mendesak agar Jepang segera menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa Indonesia. Akhirnya pengambilalihan ini berhasil atas nama pemerintah RI untuk wilayah *Bunshu Musikami Rawas*, kemudian keadaan wilayah tidak mengalami perubahan, hanya merubah istilah Jepang saja. Nama *Bunshu Musikami Rawas* berubah menjadi Kabupaten Musi Ulu Rawas, nama *Musikami Gun* menjadi Kewedanaan Musi Ulu, dan *Rawas Gun* menjadi Kewedanaan Rawas (Susetyo and Ravico 2021a:23).

Memasuki masa perjuangan revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas yakni Lubuklinggau, statusnya menjadi ganda setelah pemerintahan sipil Karesidenan Palembang menjadikan Lubuklinggau sebagai ibukota sementara, akibat Kota Palembang telah berhasil dikuasai Belanda setelah Perang 5 Hari 5 Malam, disusul Lahat juga telah berhasil dikuasai Belanda pada saat peristiwa Agresi Militer Belanda I tahun 1947. Selain menjadi kedudukan pemerintahan sipil, daerah Musi Ulu Rawas (Lubuklinggau) menjadi kedudukan militer daerah Sumatera Selatan yakni Sub Teritorium Sumatera

Selatan (SUBKOSS) pada tahun 1948. Hal ini dikarenakan beberapa daerah di wilayah Karesidenan Palembang telah jatuh ke tangan Belanda, sehingga pemerintahan militer juga perlu mengkonsolidasi kekuatan dan perlu mengatur strategi untuk melawan Belanda, oleh karenanya militer diupayakan mundur terlebih dahulu ke daerah pedalaman, dapat dikatakan bahwa daerah Lubuklinggau sekitarnya relatif masih aman.

Saat militer Sub Teritorium Sumatera Selatan (SUBKOSS) berada di Lubuklinggau, mereka memiliki empat wilayah sub teritorium diantaranya: Sub Teritorium Palembang untuk Karesidenan Palembang, Sub Teritorium Jambi untuk Karesidenan Jambi, Sub Teritorium Bengkulu untuk Karesidenan Bengkulu, dan Sub Teritorium Lampung untuk Karesidenan Lampung. Praktis ketika Belanda kembali menyerang Indonesia termasuk Sumatera Selatan melalui Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, maka Sub Teritorium Palembang (STP) menjadi kekuatan utama pertahanan untuk wilayah Palembang yang bermarkas di Muara Beliti. Meskipun nantinya STP yang dipimpin Letkol. Bambang Utoyo mundur dan bertahan di Tanjung Sakti bersama-sama dengan pemerintahan sipil Karesidenan Palembang dipimpin Residen Abdul Rozak, serta pemerintahan sipil Kabupaten Musi Ulu Rawas dipimpin Bupati A. Aziz. Tentu hal ini menjadi kekosongan pemerintahan untuk Kabupaten Musi Ulu Rawas pada masa revolusi fisik ini.

Pemerintahan sipil di Musi Ulu Rawas ketika itu dalam keadaan kosong karena pada awal Januari 1949, Letkol Bambang Utoyo sebagai

komandan STP, Residen Abdul Rozak, Bupati A. Aziz beserta rombongan mengungsi ke arah Tanjung Sakti. Sebelum meninggalkan Muara Beliti dan Lubuklinggau, Letkol Bambang Utoyo telah membentuk kekuatan pertahanan wilayah Musi Ulu Rawas yakni Sektor Utara Sub Teritorial Palembang (SUSTP) berkedudukan di Mandi Aur di bawah pimpinan Kapten AR. Saroingsong, dan stafnya Kapten M. Sai Husin. Namun untuk kepala pemerintahan sipil Kabupaten Musi Ulu Rawas belum sempat terbentuk. Apalagi pada tanggal 29 Desember 1948, Muara Beliti telah jatuh ke tangan Belanda. Kemudian disusul Lubuklinggau yang jatuh dikuasai Belanda pada tanggal 5 Januari 1949 (Suwandi 2003:9-10).

Mengingat kekosongan pemerintahan Musi Ulu Rawas ini, hal ini dipandang perlu menunjuk seseorang yang akan ditugaskan menjadi bupati untuk memimpin pemerintahan sipil, dan bersinergi dengan militer Sektor Utara Sub Teritorial Palembang (SUSTP) berkedudukan di Mandi Aur di bawah pimpinan Kapten AR. Saroingsong.

B. Biografi Mohammad Hasan

Lahir di Muara Dua, Ogan Komering Ulu Selatan pada 20 Maret 1920 di lingkungan perwira polisi. Ia lahir dari keluarga pejabat Pamong Praja masa kolonial Belanda dan sangat teguh menjalankan agamanya. Kebiasaan ini tertanam sejak kecil, berkat bimbingan orang kedua orang tuanya, yaitu H. Achmad dan Mariatoel Koptiah yang selalu memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan Hasan kecil, serta adik-adiknya. Pendidikan awal yang tempuh Mohammad Hasan ialah menamatkan di HIS di Palembang

tahun 1935 dan MULO tahun 1938. Kemudian pendidikannya dilanjutkan di MOSVIA tahun 1941, sehingga bekal ilmu kepolisian dan perguruan tingginya sangat cukup menjadikannya orang yang berpengalaman (Achmadi 1998:147).



Gambar 1. Mohammad Hasan, Bupati Militer untuk Kabupaten Musi Ulu Rawas (Sumber: Arsip Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya)

Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau kala itu berada di Lematang Ulu, Lahat, Sumatera Selatan dan dipercaya menjadi Pamong Praja. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 23 Maret 1946, ia diangkat sebagai Inspektur Polisi I di bawah Komisaris Polisi I Achmad Bastari.

Di masa-masa awal perjuangannya sebagai polisi, beliau juga memiliki pengalaman dalam melawan penjajah. Pada saat menjabat sebagai Pamong Praja di Lahat, pernah ditugaskan untuk turut membantu pembentukan BKR-TKR,

lalu mencari persenjataan untuk melengkapi tentara Indonesia dan mengerahkan tenaga-tenaga pejuang untuk menyusup ke daerah-daerah yang diduduki Belanda. Namun pada akhir Desember 1946, Mohammad Hasan terlibat dalam peperangan di Palembang melawan Belanda. Padahal, saat itu ia sedang hadir dalam rapat pimpinan Kepolisian Karesidenan Palembang. Disusul kemudian pada awal Januari 1947, terjadi pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, ia mendapat tugas untuk turut serta menangani pengerahan laskar dari Lahat menuju Palembang, beserta logistiknya. Ketika itu, ia menjabat sebagai kepala polisi wilayah Lahat.

Ketika terjadi peristiwa *Clash I* pada tahun bulan Juli 1947, Mohammad Hasan berada di Pagaralam dan menduduki tugas sebagai kepala polisi wilayah. Tugas yang dilakukannya bersama-sama Pamong Praja Wedana Ibrahim dan Kapten Sai Husin, yakni mengerahkan tenaga-tenaga pejuang dan mengirim logistik untuk kebutuhan mereka selama berada di medan pertempuran, sekaligus sebagai penyambung informasi. Sedangkan yang tampil sebagai pimpinan perang gerilya waktu itu ialah Kolonel Hasan Kasim sebagai komandan Brigade Garuda Dempo, menggantikan Kolonel Harun Sohar. Setelah peristiwa *Clash I* diakhiri dengan *cease fire*, Mohammad Hasan kemudian dimutasi ke Lubuklinggau dan diangkat menjadi Wakil Kepala Kepolisian Karesidenan Palembang. Kala itu Lubuklinggau telah dijadikan ibukota sementara Karesidenan Palembang dengan Residen Abdul Rozak sebagai kepala daerah. Tugas utamanya ialah mengkonsolidasi para pejabat polisi yang mengungsi dari

daerah-daerah yang telah dikuasai pasukan Belanda, sambil menyusun kembali Brigade Mobil untuk dikirim ke front-front pertahanan lawan (Achmadi 1998:149).

Setelah militer Sub Teritorium Sumatera Selatan (SUBKOSS) yang juga berkedudukan di Lubuklinggau, ia menjabat sebagai Wakil Kepolisian Sumatera Selatan di bawah komando Kolonel Maludin Simbolon. Ketika Lubuklinggau diserang Belanda saat *Clash II* pada Desember 1948, Mohammad Hasan beserta Kolonel Maludin Simbolon dan rombongan mundur ke Curup. Tetapi tak ayal, Curup pun juga mendapat serangan dari pasukan Belanda. Akhirnya, melihat situasi yang tidak aman, Mohammad Hasan turut serta bersama komando Sub Teritorium Sumatera Selatan secara mobil dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Dalam rombongan itu, turut serta drg. Moh. Isa sebagai Komisaris Pemerintah RI, dan beberapa pasukan lain berangkat menuju daerah Muara Aman di daerah Karesidenan Bengkulu. Sementara dr. AK. Gani yang telah diangkat menjadi Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan memilih Lebong Tandai sebagai pusat pertahanan dan menjaga komunikasi dengan rombongan Kolonel Maludin Simbolon, Mohammad Hasan, drg. Moh. Isa yang memutuskan untuk mundur ke arah Jambi.

Disinilah perjuangan Moh. Hasan dimulai menjadi Bupati Musi Ulu Rawas setelah Bupati A. Aziz bergabung dengan STP pimpinan Letkol Bambang Utoyo untuk mundur ke Tanjung Sakti bersama Residen Abdul Rozak. Maka pada tanggal 11 Agustus 1949, Mohammad Hasan diperintahkan dari Jambi untuk kembali ke Musi Ulu Rawas yang

ditugaskan untuk menjadi bupati militer, turut menyertai Letnan Sarnubi Said dan Terajumas Razak (tentara pelajar). Akibat Lubuklinggau dan Muara Beliti telah dikuasai Belanda, Mohammad Hasan bergabung dengan Sektor Utara Sub Teritorial Palembang (SUSTP) pimpinan Kapten AR. Saroingsong berkedudukan di Mandi Aur.

C. Perjuangan Mohammad Hasan sebagai Bupati Militer di Kabupaten Musi Ulu Rawas

Pada tanggal 19 Desember 1948, pasukan Belanda melakukan Agresi Militer II untuk menyerang wilayah Indonesia. Dan Lubuklinggau sebagai kedudukan sipil dan militer tidak lepas dari serangan secara serentak bersama-sama dengan Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Rupanya rencana penyerangan *Clash II* ini didengar oleh unit pemantau radio dipimpin Kapten AM. Thalib, sehingga dapat mempersiapkan segala macam strategi pertahanan. Kolonel Maludin Simbolon sebagai panglima SUBKOSS beserta staf memutuskan mundur ke arah Curup, bergabung dengan pemerintahan sipil Propinsi Sumatera Selatan yang dipimpin drg. M. Isa. Kemudian dengan pertimbangan politik, maka diputuskan untuk mundur ke Muara Aman.

Saat peristiwa *Clash II* itu pula, pemerintah pusat melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menjadikan Sumatera Selatan sebagai pemerintahan militer bernama Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan (DMISS), dan mengangkat dr. AK. Gani menjadi Gubernur Militer, dan wakil gubernurnya Kolonel

Maludin Simbolon. Baru pada bulan Maret 1949, tibalah dr. AK. Gani di Muara Aman setelah mengadakan perjalanan dari Lampung menembus hutan Bukit Barisan menggunakan mobil Jeep Willys, akses jalan yang tidak bisa dilalui mobil, maka dr. AK. Gani naik kuda.

Setelah semua berkumpul di Muara Aman, rombongan berpecah untuk terus bergerilya. Gubernur Militer dr. AK. Gani beserta staf memilih Lebong Tandai, sedangkan rombongan Kolonel Maludin Simbolon, membawa ajudan Letnan I Suprpto dan pasukan bersenjata lengkap 25 orang, turut serta drg. M. Isa sebagai Komisaris Pemerintah RI dan sekretaris Mulyadi, Komisaris II Mohammad Hasan dari Kepolisian, dr. Aziz dari kesehatan, Letnan II Bangun Hararap (Intel), Letnan II Roni Macan (CPM), Ali Hanafiah (PHB), dan beberapa pasukan lainnya. Mereka berangkat melalui lereng Bukit Barisan dari daerah Lebong menuju Ulu Rawas dengan berjalan kaki menembus hutan dan sampai di Pulau Kidak. Lalu menembus hutan kembali hingga tiba di sebuah dusun Sekeladi, letaknya di hulu Sarolangun Jambi. Kemudian menyusuri sungai ke hulu dari Bangko, dan tibalah di Muara Siau dan disambut oleh Letkol Abunjani sebagai komandan Sub Teritorium Jambi. Kemudian rombongan kembali menuju Bangko, lalu ke Muara Bungo kemudian dilanjutkan ke Muara Tebo. Dan di Karesidenan Jambi inilah rombongan sipil dan militer Sumatera Selatan mempertahankan diri mereka dan bergerilya disana. Setelah beberapa kali menghindar dari serangan Belanda, maka akhirnya rombongan memilih bertahan di lereng gunung Masurai, tepatnya di Dusun Tua di

Karesidenan Jambi hingga masa perundingan *Roem Royen* dan memasuki masa *cease fire* (Wawancara Simbolon, 1990).

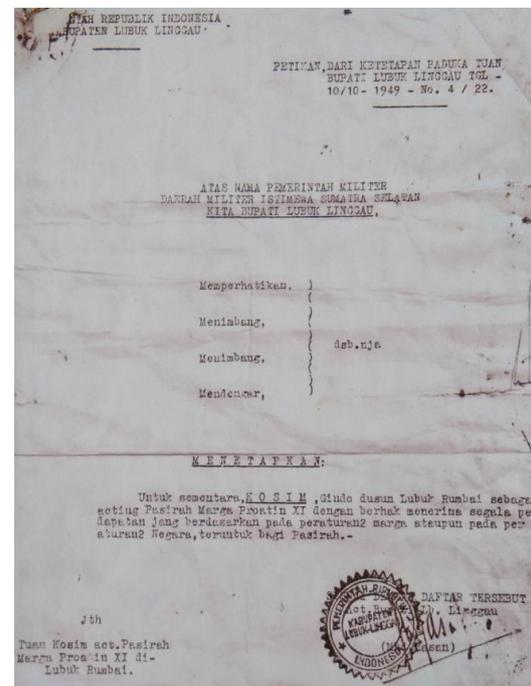
Dalam rekaman pembicaraan Mohammad Hasan dari hasil wawancara tanggal 31 Maret 2003 di rumah beliau di Jl. Pangkalan Jati I, No. 71 Jakarta Selatan, sebagai berikut:

Mula-mula saya jadi Bupati, suasana waktu itu sudah *cease fire*, maka ketika perjalanan saya dari Jambi lewat Surulangun Rawas, Rupit, Paduraksa dan tiba daerah kolonisasi Tugumulyo (Q), saya bersama rombongan Sarnubi Said, Roni Macan. Saat sampai di Tugumulyo, setelah beberapa hari disana saya dijemput oleh Kapten AR. Saroingsong, lalu dibawa ke Mandi Aur. Kegiatan-kegiatan saya di Mandi Aur, seperti sebelum serah terima dengan Belanda, saya mengadakan rapat terlebih dahulu dengan pihak militer Kapten AR. Saroingsong sebagai komandan Sektor Utara Sub Teritorial Palembang (SUSTP), kemudian saya sebagai Bupati dari pemerintahan Musi Ulu Rawas juga rapat dengan pihak Belanda. Hasil rapat tersebut mengenai penyerahan wilayah, tetapi belum dapat dilaksanakan sebab menunggu keputusan pemerintah pusat atas hasil dari Den Haaq (Konferensi Meja Bundar, karena masih *cease fire*, belum waktu penyerahan.

Kebijakan *cease fire* merupakan usaha penghentian tembak menembak antara dua pihak

yang sedang berperang. Dalam selebaran yang ditandatangani oleh Gubernur Militer dr. AK. Gani yang berbunyi: Atas perintah panglima tertinggi TNI PTTS, kuasa diberikan Kolonel Hidayat maka kami dr. AK. Gani sebagai Gubernur Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan memerintahkan kepada semua kesatuan TNI serta badan-badan perjuangan rakyat yang bersenjata menghentikan tembak menembak dan permusuhan serta tetap di tempat masing-masing mulai tanggal 3 Agustus 1949 jam 24:00 (Suwandi 2003:12-13).

Selama di Mandi Aur, Moh. Hasan menjalankan peran sebagai bupati Musi Ulu Rawas. Desa Mandi Aur merupakan pusat semua kegiatan untuk daerah Palembang bagian Utara. Oleh karena itu, pusat pemerintahan Kabupaten Musi Ulu Rawas berada disana setelah Muara Beliti dan Lubuklinggau dikuasai oleh pasukan Belanda.



Gambar 2. Surat Penetapan Pesirah yang ditandatangani Mohammad Hasan sebagai Bupati Musi Ulu Rawas

(Sumber: Arsip Museum Perjuangan Subkoss Garuda Sriwijaya)

Setelah ada perintah penyerahan, maka yang pertama kali daerah yang diserahkan ialah Surulangun Rawas. Untuk pergi ke Surulangun Rawas, saya dijemput Belanda pakai mobil militer, pulanginya dengan sepeda sebab Belanda pulang melalui Sarolangun Jambi. Penyerahan daerah Surulangun Rawas dari Belanda kepada pemerintah RI antara *asisten-residen* Belanda bernama *Hartman* atas nama pemerintah Belanda kepada saya sebagai Bupati Musi Ulu Rawas atas nama pemerintah RI. Karena ditugaskan dari Jambi menjadi bupati, maka yang menyerahkan rupanya pemerintah Belanda dari Jambi (Wawancara Moh. Hasan, 2003). Penyerahan pertama wilayah Kabupaten Musi Ulu Rawas untuk Kewedanaan Rawas di Surulangun ini terjadi pada tanggal 28 Desember 1949.

Setelah menerima penyerahan di Surulangun, Moh. Hasan direncanakan akan menerima penyerahan untuk wilayah Kewedanaan Musi Ulu di Lubuklinggau pada tanggal 30 Desember 1949. Tetapi ia telah mendapat mandat untuk menjadi Kepala Polisi di Karesidenan Bengkulu, maka yang menerima penyerahan wilayah Kewedanaan Musi Ulu dari Belanda ialah Residen Abdul Rozak dan Letkol Bambang Utoyo di Lapangan Merdeka, Lubuklinggau.

Seperti yang diungkapkan Moh. Hasan sebagai berikut:

Setelah kembali dari penyerahan di Surulangun Rawas, saya hendak ke Lubuklinggau, maksudnya

akan menerima penyerahan dari Belanda di Lubuklinggau. Akan tetapi, saya telah diperintah oleh Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan, dr. Adnan Kapau Gani, artinya sebelum melakukan penyerahan di Lubuklinggau, saya mendapat perintah baru lagi, kata pak Gani "Pergi kamu ke Bengkulu, jadi Polisi lagi!" Dengan begitu, saya menjadi Bupati Musi Ulu Rawas lebih kurang 3 (tiga) bulan. Saya menjalankan tugas sebagai bupati itu sibuk. Namanya saja menjalankan tugas sebagai pemerintah, saya mengangkat pesirah-pesirah misalnya Pesirah Abu Kosim di Mandi Aur (Wawancara Moh. Hasan, 2003).

Simpulan

Mohammad Hasan sebagai Bupati Militer di Kabupaten Musi Ulu Rawas pada periode Agustus hingga Desember Tahun 1949. Mohammad Hasan menjadi bupati Musi Ulu Rawas akibat kekosongan pemerintahan setelah bupati sebelumnya, A. Aziz memilih bergabung dengan militer Sub Teritorium Palembang yang dipimpin Letkol Bambang Utoyo dan sipil Karesidenan Palembang dipimpin Residen Abdul Rozak yang mundur ke arah Pagaralam. Selama menjadi bupati yang berkedudukan di Mandi Aur, Mohammad Hasan pernah melantik seorang pesirah. Kemudian memasuki penyerahan kedaulatan di wilayah Musi Ulu Rawas, daerah pertama yang diserahkan ialah Kewedanaan Rawas di Surulangun pada 28 Desember 1949, berlanjut penyerahan kedaulatan di

Kewedanaan Musi Ulu di Lubuklinggau. Akan tetapi penyerahan ini tidak bisa diterima oleh Mohammad Hasan karena telah diangkat menjadi Kepala Polisi di Karesidenan Bengkulu.

Berkat sikapnya seorang yang memiliki watak keras dan disiplin tinggi, tanpa kompromi pada siapapun yang berbuat salah, maka diperlukan untuk memimpin sebuah pemerintahan di masa darurat perang. Kepada generasi muda, Pak Hasan berpesan, "Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Peliharalah kesatuan dan persatuan. Dan bekerjalah lebih keras agar tujuan kemerdekaan dapat dicapai sepenuhnya". Kemudian dari tulisan sejarah mengenai Mohammad Hasan ini, diharapkan akan timbul tulisan-tulisan baru mengenai tokoh lain yang pernah berjuang dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada masing-masing wilayah yang luas ini.

Daftar Pustaka

- Arsip Wawancara Mohammad Hasan pada tanggal 31 Maret 2003 di Jl. Pangkalan Jati I, No. 71 Jakarta Selatan.
- Arsip Wawancara Kolonel Maludin Simbolon pada tanggal 10 Maret 1990 di Jakarta.
- Achmadi. (1998). *Profil Pejuang Angkatan '45*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Cerdas.
- Gottschalk, Louis. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Hasan, Mr. T. Moh. (1990). "PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)." Pp. 122-133 in *Pemerintahan Darurat Republik Indonesia; Dikaji Ulang*. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia.
- Kuntowijyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nizar, Muhammad, and Suganda P. Pasaribu. (2014). *Dari Periode Ke Periode Bupati Musi Rawas 1945-2015*. Jakarta: Health Press dan KPAD Mura.
- Pusat Sejarah dan Tradisi TNI. 2000. *Sejarah TNI Jilid 1 (1945-1949)*. Jakarta: Markas Besar TNI.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1911 no. 601. *Landsdrukkerij-Batavia*.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1934 no. 186. *Landsdrukkerij-Batavia*.
- Subkoss, Tim Penyusun Sejarah Perjuangan. (2003). *Sejarah Dan Peranan SUBKOSS Dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel (1945-1950)*. edited by A. Halim. Palembang: Dewan Harian Daerah 45 Sumatera Selatan.
- Susetyo, Berlian, and Ravico. (2021). "Kota Lubuklinggau Dalam Kurun Waktu 1825-1948." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 10(1):14-29.
- Susetyo, Berlian, and Ravico. (2021). *Sejarah Lubuklinggau Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Suwandi. (2003). *Mengungkap Sejarah Komisaris II Polisi Moh. Hasan Sebagai Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 1949*. Lubuklinggau: Yayasan Subkoss Garuda Sriwijaya.